

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Pemerintahan	2 Tugas dan 1 Laporan
		2. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Hukum dan Organisasi	1 Tugas
		3. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Perencanaan	1 Tugas

Program/Kegiatan		Anggaran (RP)
Bina Administrasi Kewilayahan		
1.	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	: 405,902,000
2.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Kerjasama yang dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	: 253,861,000
3.	Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	: 541,136,000
4.	Pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota	: 245,316,000
5.	Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah	: 226,506,000
Total Anggaran		: 1,672,721,000

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....
.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Keuangan	1 Tugas
		2. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Perencanaan	1 Tugas

Program/Kegiatan		Anggaran (RP)
Bina Administrasi Kewilayahan		
1.	Memberikan Rekomendasi atas Usulan DAK Kabupaten/Kota di Wilayahnya	: 209,106,000
2.	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota	: 231,372,000
Total Anggaran		: 440,478,000

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....
.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
1.	Meningkatnya Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1.	Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Pengawasan	1 Tugas

Program/Kegiatan		Anggaran (RP)
Bina Administrasi Kewilayahan		
1.	Monitoring, Evaluasi dan Supervisi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya	: 533,942,000
Total Anggaran		: 533,942,000

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....
.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
1.	Meningkatnya Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1.	Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan PTSP	1 Tugas

Program/Kegiatan		Anggaran (RP)
Bina Administrasi Kewilayahan		
1.	Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	: 500,000,000
Total Anggaran		: 500,000,000

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....
.....
NIP.